

LAMPIRAN XX

KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NOMOR : 050/147/VIII/Kpts/2016

TANGGAL : 29 Agustus 2016

**PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR TAHUN 2016**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Bahwa untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan yang efektif, efisien, mandiri dan transparan di bidang perencanaan pembangunan daerah guna mencapai sasaran dan prioritas Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor pada Tahun 2016, Pemerintah Kabupaten Bogor telah membentuk Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016 telah dilakukan perubahan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bogor Nomor 25 Tahun 2015 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perubahan tersebut didasarkan pada hasil pengendalian dan evaluasi terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, dimana terdapat ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, sehingga adanya perubahan, pergeseran, penambahan dan penghapusan pada indicator, target kinerja/program dan anggaran Tahun 2016.

Dengan adanya perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor tahun 2016 tersebut, maka Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016, perlu diubah dan disesuaikan guna menjamin sinkronisasi perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2016 dengan perencanaan program/kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Bogor.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016 secara simultan dilakukan dengan mempedomani perubahan-perubahan arah kebijakan yang tercantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016. Untuk itu, sebagaimana terantum dalam Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2016, perlu dilakukan Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 yang didasarkan atas hasil evaluasi kinerja program dan kegiatan sampai dengan triwulan II tahun anggaran 2016. Dalam hal ini, factor utama perubahan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja ditujukan untuk mencapai target kinerja tahun 2016 yang telah ditetapkan.

Perubahan Rencana Kerja lingkup Satuan Polisi Pamong Praja terutama berupa pergeseran anggaran antar kegiatan, penambahan/penghapusan kegiatan, atau penambahan/pengurangan jumlah anggaran serta target dan indicator kinerja untuk menyesuaikan dengan upaya pencapaian target dalam rangka mewujudkan visi Kabupaten Bogor menjadi Kabupaten Termaju di Indonesia.

1.2 Maksud dan Tujuan Penyusunan Pedoman

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja merupakan penguatan peran para stakeholders dalam pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah, serta sebagai dasar evaluasi dan laporan pelaksanaan atas kinerja tahun 2016 yang sedang berjalan hingga triwulan II.

Secara umum, maksud penyusunan RKPD (Rencana Kerja Pembangunan Daerah) adalah menjamin tercapainya konsistensi perencanaan dan penganggaran prioritas pembangunan daerah yang bersinergi dengan perencanaan pembangunan tahunan nasional dan Provinsi Jawa Barat. Maksud dan Tujuan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah sebagai berikut :

- Terwujudnya sinkronisasi pembangunan daerah dengan pembangunan ditingkat Provinsi Jawa Barat dan Nasional Tahun 2016 berdasarkan kewenangan penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- Terintegrasikannya program/kegiatan dalam dokumen Rencana Kerja SKPD dengan prioritas pembangunan daerah tahun 2016;
- Terwujudnya efisiensi dan efektifitas sumber daya dalam rangka pembangunan daerah.

Secara Khusus, maksud penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 adalah untuk memberikan gambaran mengenai kebijakan, program dan kegiatan beserta indikator kinerja dan pagu indikatif masing-masing program kegiatan yang akan dilaksanakan langsung Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor. Secara khusus Rencana Kerja Perubahan ini mempunyai tujuan:

1. Mewujudkan konsistensi dan sinkronisasi perencanaan tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor berdasarkan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor untuk melaksanakan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor .
2. Menjadikan Perubahan Rencana Kerja sebagai suatu perangkat manajerial dalam manajemen perencanaan yang efektif, efisien dan akuntabel dalam kurun waktu satu tahun kedepan.
3. Menyelaraskan perencanaan program kegiatan dan penganggaran tahunan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor .

4. Menyediakan informasi dan gambaran hasil evaluasi pelaksanaan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor serta indikator kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor yang akan diwujudkan dalam pelaksanaan program tahun depan.

1.3 Landasan Hukum

Dasar hukum Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali dirubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Pengolahan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 19 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 36);

8. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 27 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bogor Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 27);
9. Perda Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Perda Kabupaten Bogor Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 8 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2009 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Nomor 37).
12. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 4 Tahun 2015 tentang Ketertiban Umum;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pembentukan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 12);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Satuan Polisi Pamong Praja Pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor.
16. Keputusan Bupati Nomor 050/315/Kpts/Per-UU/2016 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Keputusan Bupati Bogor Nomor 050/294/Kpts/Per-UU/2015 tentang Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Bogor Tahun 2016.

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja SKPD Sampai Dengan Triwulan II Tahun Berjalan

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun 2016 yang mengacu pada laporan Evaluasi Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan Triwulan II Tahun berjalan beserta capaian indikator kinerja outputnya adalah sebagai berikut:

A. Realisasi program/kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan.

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran

1.1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, dari target biaya Rp.169.200.000,- terealisasi sebesar Rp. 73.272.420,- atau 43,31%, keluaran dari kegiatan ini adalah jumlah Rekening jaringan telepon, listrik dan internet selama 12 bulan, Realisasinya adalah Rekening jaringan telepon, listrik dan internet selama 6 bulan atau sebesar 50%. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran serta kenyamanan pelaksanaan tugas dalam 1 tahun. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori sedang karena kegiatan ini berisi tentang pembayaran kebutuhan kantor yang bersifat rutin setiap bulan.

1.2. Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perijinan Kendaraan Dinas/Operasional, dari target biaya Rp.30.825.000,- terealisasi sebesar Rp. 6.461.500,- atau 20,96%, keluaran dari kegiatan ini adalah terbayarnya pajak kendaraan operasional selama 1 tahun dari 25 unit kendaraan operasional, Realisasinya telah terbayar pajak kendaraan operasional sebanyak 5 unit kendaraan. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran serta kenyamanan pelaksanaan tugas dalam 1 tahun.

- 1.3. Kegiatan Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor, dari target biaya sebesar Rp. 147.715.000,- realisasinya sebesar Rp. 75.715.000,- atau 51,26% dengan keluaran jumlah tenaga jasa pelayanan kebersihan perkantoran dari target sebesar 12 bulan realisasinya adalah sudah 6 bulan. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terciptanya suasana bersih dan nyaman dalam berkerja selama 12 bulan.
- 1.4. Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, dari target biaya sebesar Rp. 57.360.000,- realisasinya sebesar Rp. 5.000.000,- atau 8,72 % dengan keluaran jumlah kebutuhan barang cetak dan penggandaan dari target sejumlah 15 macam dan 36.115 penggandaan realisasinya sebanyak 2 macam. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran pelaksanaan tugas aparatur selama 12 bulan.
- 1.5. Penyediaan Bahan Logistik Kantor, dari target biaya Rp. 359.475.000,- realisasinya sebesar Rp. 184.275.000, atau sebesar 51,26%. Dengan keluaran 2 jenis selama 12 bulan. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terpenuhinya bahan logistik kantor.
- 1.6. Kegiatan Penyediaan Makanan dan Minuman, dari target biaya sebesar Rp. 138.600.000,- realisasinya sebesar Rp. 55.440.000,- atau sebesar 51,26% dengan keluaran tersedianya kebutuhan jamuan makanan dan minuman dari target snack tamu sebanyak 4.840 terealisasi sebesar 2.420 snack. Sedangkan hasil yang dicapai adalah tersedianya jamuan makan rapat selama 1 tahun.
- 1.7. Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar dan Dalam Daerah, dari target biaya sebesar Rp. 364.700.000,- realisasinya sebesar Rp. 95.627.250,- atau sebesar 26,22 % dengan keluaran terwujudnya rapat-rapat koordinasi dan konsultasi kedalam dan luar daerah dari target sejumlah

80 kegiatan dalam daerah dan 34 kegiatan luar daerah realisasinya sejumlah 40 kegiatan dalam daerah dan 18 kegiatan luar. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya koordinasi koordinasi antar instansi horizontal dan vertikal dalam 1 tahun.

- 1.8. Kegiatan Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran dari target biaya sebesar Rp. 310.493.000,- realisasinya sebesar Rp. 132.70.000,- atau sebesar 42,79 % dengan keluaran jumlah jasa tenaga pendukung administrasi perkantoran yang tersedia, yaitu sebanyak 14 orang dari target selama 12 bulan. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kinerja pegawai kontrak dan arsiparis dalam 12 bulan.
- 1.9. Kegiatan Pelayanan dokumentasi dan arsip SKPD, dari target biaya sebesar Rp. 163.170.000,- realisasinya sebesar Rp. 82.030.000,- atau sebesar 50% dengan keluaran jumlah dokumen arsip yang terpelihara dari target selama 12 bulan arsip realisasinya 6 bulan atau mencapai 50%. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terwujudnya tertib administrasi pengelolaan dokumentasi dan arsip selama 12 bulan.
- 1.10. Kegiatan Penyediaan pelayanan administrasi kepegawaian, dari target biaya sebesar Rp. 172.450.000,- realisasinya sebesar Rp. 88.600.000,- atau sebesar 51% dengan keluaran jumlah dokumen pengelolaan administrasi kepegawaian Sat Pol PP dari target selama 12 bulan realisasinya pelayanan administrasi kepegawaian selama 6 bulan atau sebesar 50%. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terwujudnya tertib administrasi kepegawaian dari selama 12 bulan.
- 1.11. Kegiatan Penyediaan Pelayanan Administrasi Barang, dari target biaya sebesar Rp. 54.700.000,- realisasinya sebesar Rp. 27.350.000,- atau sebesar 50% dengan keluaran

jumlah dokumen administrasi barang dari target 14 orang pengelola barang selama 12 bulan realisasinya pelayanan administrasi barang selama 6 bulan atau mencapai 50%. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terwujudnya tertib administrasi inventaris aset daerah selama 12 bulan.

1.12. Kegiatan Penyediaan Jasa Bantuan Pol PP dari target biaya sebesar Rp. 10.989.968.000,- realisasinya sebesar Rp. 5.345.138.880 atau sebesar 39,61% dengan keluaran jumlah pelayanan keamanan kantor dari target 300 orang selama 12 bulan realisasinya sebanyak 300 orang selama 6 bulan. Sedangkan hasil yang dicapai adalah terciptanya suasana aman dalam berkerja di dari selama 12 bulan.

2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur

2.1. Kegiatan Pengadaan Peralatan Kantor, dari target biaya Rp. 118.513.000,- realisasinya Rp. 47.520.000,- dengan keluaran jumlah pengadaan peralatan kantor 3 jenis peralatan kantor terealisasinya sebanyak 3 jenis peralatan kantor. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran operasional kantor selama 12 bulan.

2.2. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional, dari target biaya Rp. 216.925.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 51.721.000,- dengan keluaran jumlah kendaraan yang dipelihara sebanyak mobil 15 unit, motor 12 unit telah terealisasi mobil 10 unit dan motor unit. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran operasional kantor selama 12 bulan.

2.3. Kegiatan Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur, dari target biaya Rp. 4.000.000,- telah terealisasi sebesar Rp. 2.830.000,- dengan keluaran jumlah mebeleur yang dipelihara sebanyak 12 unit mebeleur, telah terealisasi 12 unit. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kelancaran operasional kantor selama 12 bulan.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur

- 3.1. Kegiatan Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan, dari target biaya sebesar Rp. 155.600.000,- realisasinya sebesar Rp. 145.638.000,- atau 93,60% dengan keluaran pakaian dinas sebanyak 192 stel telah terealisasi 192 stel atau 100%. Sedangkan hasil yang dicapai meningkatnya kedisiplinan aparatur selama 1 tahun.
- 3.2. Kegiatan Pengawasan Kedisiplinan Kerja Anggota Sat Pol PP, dari target biaya sebesar Rp. 93.950.000,- realisasinya sebesar Rp. 47.550.000,- atau 63,26% dengan keluaran anggota yang diawasi sebanyak 180 orang. Sedangkan hasil yang dicapai meningkatnya kedisiplinan aparatur selama 1 tahun.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur

- 4.1. Kegiatan Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur Sat Pol PP dari target biaya sebesar Rp. 156.472.000, realisasinya sebesar Rp. 36.600.000, atau sebesar 9,27%. Dengan keluaran jumlah peserta dari target 30 orang dan 49 kali kegiatan telah terealisasi 24 kali kegiatan.
- 4.2. Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan dari target biaya Rp. 90.200.000, realisasinya sebesar Rp. 89.229.000, atau sebesar 98,92%. Dengan keluaran jumlah peserta dari target 40 orang realisasinya 40 orang. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya kemampuan aparat Sat Pol PP mengenai peraturan dan perundang-undangan.
- 4.3. Kegiatan Pengiriman Peserta Diklat bagi Pegawai Sat Pol PP dari target Rp. 98.400.000, telah terealisasi Rp. 3.900.000, atau sebesar 3,96%. Dengan keluaran jumlah peserta dari target 6 telah terealisasi 1 orang. Sedangkan hasil yang dicapai meningkatnya kapasitas pegawai satuan polisi pamong praja.

5. Program Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

- 5.1. Kegiatan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, dari target biaya sebesar Rp 298.937.000,- realisasinya sebesar Rp 164.037.000,- atau sebesar 54,87% dengan keluaran jumlah dokumen sebanyak 6 telah teralisasi 3 dokumen.
- 5.2. Kegiatan penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, dari target biaya sebesar Rp 60.860.000,- realisasinya sebesar Rp 60.680.000,- atau sebesar 100% dengan keluaran jumlah dokumen laporan akhir tahun yang tersedia sejumlah 1 dokumen. Sedangkan hasil yang dicapai tersedianya dokumen pelaporan keuangan akhir tahun.
- 5.3. Kegiatan penyusunan perencanaan anggaran, dari target biaya sebesar Rp. 242.250.000,- realisasinya sebesar Rp 139.880.000,- atau sebesar 57,74% dengan keluaran jumlah dokumen perencanaan anggaran yang tersedia dari target 3 jenis dokumen realisasinya sejumlah 2 jenis dokumen. Sedangkan hasil yang dicapai tersedianya dokumen anggaran 2017, dokumen anggaran perubahan 2016, dokumen rencana anggaran 2017 dan dokumen pelaksanaan anggaran 2017.
- 5.4. Kegiatan penatausahaan keuangan SKPD, dari target biaya sebesar Rp. 300.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 151.710.000,- dengan keluaran jumlah dokumen penatausahaan keuangan dari target selama 12 bulan realisasinya selama 6 bulan. Sedangkan hasil yang dicapai terwujudnya tertib administrasi keuangan Sat Pol PP.
- 5.5. Kegiatan Evaluasi Monitoring dan Pelaporan, dari target biaya sebesar Rp. 199.686.000,- realisasinya sebesar Rp. 99.786.000,- dengan keluaran jumlah dokumen hasil monitoring dan evaluasi Program dan kegiatan SKPD dari target 12 bulan terealisasi 6 bulan. Sedangkan hasil yang dicapai tersedianya dokumen hasil monitoring SKPD.
- 5.6. Kegiatan Publikasi Kinerja, dari target biaya sebesar Rp. 100.000.000, realisasinya sebesar Rp. 40.000.000, atau

sebesar 40%. Dengan keluaran jumlah publikasi kinerja Sat Pol PP dari target 10 bulan realisasinya sebesar 4 bulan.

5.7. Kegiatan Penyusunan Renja SKPD, dari target biaya sebesar Rp. 106.466.000, realisasinya sebesar Rp. 43.628.000, atau sebesar 40,98%. Dengan keluaran jumlah dokumen sebanyak 2 dokumen dari target 2 dokumen terealisasi 1 dokumen.

5.8. Kegiatan Penyusunan Renstra SKPD, dari target biaya sebesar Rp. 93.688.000, realisasinya sebesar Rp. 75.218.000, atau sebesar 80,29%. Dengan keluaran jumlah dokumen sebanyak 1 dokumen dari target 1 dokumen.

6. Program Peningkatan Kemanan dan Kenyamanan Lingkungan

6.1. Kegiatan Operasi Penertiban Bangunan yang Melanggar Perda, dari target biaya sebesar Rp. 500.000.000,- realisasinya sebesar Rp. 254.070.000 atau sebesar 50,81%, dengan keluaran jumlah bangunan yang ditertibkan dari target di 24 titik, realisasinya dilaksanakan disejumlah 6 titik., sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya penegakan terhadap perijinan bangunan target dalam 1 tahun. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori sedang karena kegiatan ini dilaksanakan secara periodik.

6.2. Kegiatan Operasi Penertiban Kegiatan Usaha, dari target biaya sebesar Rp. 462.500.000,- realisasinya sebesar Rp. 231.570.000,- atau sebesar 50,07%, dengan keluaran jumlah kegiatan usaha yang ditertibkan dari target sejumlah 24 titik realisasinya sebanyak 8 titik a, sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya penegakan terhadap kegiatan usaha selama 1 tahun.

6.3. Kegiatan Operasi Penertiban Gelandangan dan Pengemis, dari target biaya sebesar Rp. 362.000.000 realisasinya sebesar Rp. 180.840.000 atau sebesar 49,96% dengan keluaran jumlah gepeng yang ditertibkan dari target penertiban di 24 titik terealisasi penertiban 4 titik. Sedangkan hasil yang dicapai

adalah meningkatnya meningkatnya penegakan terhadap perijinan peternakan selama 1 tahun.

- 6.4. Kegiatan Operasi Penertiban Reklame/Spanduk, dari target biaya sebesar Rp. 367.680.000 realisasinya sebesar Rp. 184.290.000 atau sebesar 50,12% dengan keluaran jumlah reklame/spanduk yang ditertibkan dari target penertiban di 5 titik terealisasi penertiban 2 titik. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya meningkatnya penegakan terhadap perijinan reklame/Spanduk selama 1 tahun.
- 6.5. Kegiatan Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima, dari target biaya sebesar Rp. 1.017.320.000,- realisasinya Rp. 543.489.400,- atau sebesar 53,42% dengan keluaran jumlah PKL yang ditertibkan dari target pelaksanaan di 12 titik terealisasi penertiban di 6 titik. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dari kegiatan penertiban PKL dalam 1 tahun.
- 6.6. Kegiatan Operasi Penertiban Warung Remang – Remang/PSK, dari target sebesar Rp. 408.200.000,- realisasinya sebesar Rp. 203.880.000,- atau sebesar 49,95% dengan keluaran jumlah warung remang remang/PSK yang ditertibkan dari target penertiban terhadap 12 titik terealisasi sejumlah 6 titik. Sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum dari kegiatan penertiban WRR/PSK dalam 1 tahun. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori sedang karena kegiatan ini baru akan dilaksanakan di pertengahan tahun sambil menunggu proses penyidikan dari PPNS.
- 6.7. Kegiatan Pengendalian Keamanan Lingkungan, dari target rencana biaya sebesar Rp 1.049.600.000 atau sebesar 49,52%realisasinya sebesar Rp 519.725.000 atau dengan keluaran Jumlah pengamanan lingkungan dari target pelaksanaan 365 hari piket pengamanan wilayah perkantoran pemda, realisasinya adalah 180 hari piket pengamanan

wilayah perkantoran pemda, sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan selama 12 bulan. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori sedang karena kegiatan ini dilaksanakan secara periodik yaitu piket anggota.

- 6.8. Penyelenggaraan HUT Pol PP, dari target biaya sebesar Rp. 401.730.000,- realisasinya sebesar Rp. 313.973.950,- atau sebesar 78,16% dengan keluaran terlaksananya HUT POL PP tingkat Kabupaten dan Propinsi target 2 Kegiatan HUT Pol PP realisasinya Pelaksanaan 2 Kegiatan HUT Sat Pol PP yaitu 1 kegiatan Penyelenggaraan HUT Pol PP tingkat Kabupaten Bogor dan 1 kegiatan Pengiriman pasukan dalam rangka HUT Pol PP tingkat Provinsi Jawa Barat. Sedangkan hasil yang di capai adalah meningkatnya keamanan dan kenyamanan selama 12 bulan. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori sedang karena kegiatan ini telah dilaksanakan.

- 6.9. Rapat Koordinasi Penanganan Trantibum dengan Kecamatan, dari target biaya Rp. 79.499.000,- realisasinya sebesar Rp. 31.327.600,- atau sebesar 39,41%, dengan keluaran jumlah pelaksanaan Rapat Koordinasi Penanganan Trantibum dengan Kecamatan dari target 4 kegiatan pelaksanaan Rapat Koordinasi Trantibum terealisasi sebanyak 2 kegiatan rapat trantibum. Hasil yang dicapai meningkatnya ketentraman dan ketertiban umum di wilayah Kabupaten Bogor selama 12 bulan. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori sedang karena kegiatan ini dilaksanakan secara rutin.

- 6.10. Patroli Ketertiban Umum dari target biaya sebesar Rp. 598.600.000, realisasinya sebesar Rp. 298.800.000, atau sebesar 49,92%. Dengan keluaran jumlah patroli ketertiban umum dari target 11 titik terealisasi sejumlah 7 titik dengan hasil yang dicapai adalah untuk menjaga ketertraman dan ketertiban umum. Kegiatan ini telah terserap dengan kategori rendah karena kegiatan ini baru akan dilaksanakan secara periodik.

7. Program Pemeliharaan Ketentraman dan ketertiban Masyarakat dan Pencegahan tindak kriminal.
 - 7.1. Kegiatan Penyidikan Pelanggaran Perda oleh PPNS, dari target rencana biaya sebesar Rp. 925.725.000,- realisasinya sebesar Rp. 411.302.875,- atau sebesar 44,43% dengan keluaran jumlah kasus pelanggaran Perda yang disidik oleh PPNS dari target terhadap 60 kasus pelanggaran Perda realisasinya penyidikan terhadap 15 kasus pelanggaran Perda. sedangkan hasil yang dicapai adalah meningkatnya PAD dari upaya penegakan Perda.
 - 7.2. Kegiatan Patroli Tramtibum dan Penegakan Perda di UPT Sat Pol PP Kecamatan dengan anggaran Rp. 1.731.000.000, realisasinya sebesar Rp. 864.000.000, atau sebesar 49,91%. Dengan keluaran jumlah patroli yang dilaksanakan oleh 40 UPT dalam 1 tahun. Sedangkan hasil yang ingin dicapai adalah terselenggaranya ketentraman dan ketertiban umum.
8. Program Peningkatan Pemberantasan Penyakit masyarakat.
 - 8.1. Penyuluhan Pencegahan Penyakit Masyarakat dari target biaya sebesar Rp. 405.250.000, realisasinya sebesar Rp. 157.855.000, atau sebesar 38,95%. Dengan keluaran jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari target 4000 orang realisasinya sejumlah 1200 orang atau. Sedangkan hasil yang dicapai adalah berkurangnya gangguan kantibmas dalam 1 tahun.
9. Program Pemberdayaan Masyarakat Dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.
 - 9.1. Kegiatan Pembinaan Kelinmasan dalam Penanganan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan dari target biaya sebesar Rp. 483.097.000, realisasinya sebesar Rp. 365.209.950, atau sebesar 75,60%. Dengan keluaran jumlah masyarakat yang mengikuti pelatihan dari target 1.060 orang linmas realisasinya sejumlah 950 orang linmas. Sedangkan hasil yang dicapai adalah berkurangnya gangguan kantibmas dalam 1 tahun.

- 9.2. Kegiatan Pelantikan Kepala Satuan Linmas Tingkat Kabupaten Bogor Tahun 2016 dari target biaya sebesar Rp. 80.923.000, realisasinya sebesar Rp. 58.200.000, atau sebesar 71,92%. Dengan keluaran jumlah kasatgas linmas yang mengikuti pelantikan dari target 434 orang realisasinya sejumlah 434 orang. Sedangkan hasil yang dicapai adalah berkurangnya gangguan kantibmas dalam 1 tahun.
- 9.3. Kegiatan Pendataan Sat Linmas Se-Kabupaten Bogor Tahun 2016 dari target biaya sebesar Rp. 113.066.000, realisasinya sebesar Rp. 24.635.000, atau sebesar 21,79%. Dengan keluaran jumlah linmas yang didata dari target 4.340 orang linmas realisasinya sebanyak 1.910 orang linmas. Sedangkan hasil yang dicapai adalah berkurangnya gangguan kantibmas dalam 1 tahun.
- 9.4. Kegiatan Evaluasi Pelaksanaan Kelembagaan Organisasi Perlindungan Masyarakat dari target biaya sebesar Rp. 214.730.000, realisasinya sebesar Rp. 27.960.000, atau sebesar 13,02%. Dengan keluaran jumlah kastgas yang mengikuti kegiatan dari target 434 orang realisasinya sebanyak 48 orang. Sedangkan hasil yang dicapai adalah berkurangnya gangguan kantibmas dalam 1 tahun.
- 9.5. Kegiatan Pelatihan Manajemen dan Juknis Poskamdes dari target biaya sebesar Rp. 107.856.000, realisasinya sebesar Rp. 106.476.000, atau sebesar 98,72%. Dengan keluaran jumlah peserta yang mengikuti pelatihan dari target 100 orang realisasinya sebanyak 100 orang. Sedangkan hasil yang dicapai adalah berkurangnya gangguan kantibmas dalam 1 tahun.

BAB III

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DALAM PERUBAHAN RENJA SKPD

3.1 Tujuan dan Sasaran Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016

Memuat kegiatan lanjutan tahun sebelumnya, pergeseran kegiatan, penghapusan kegiatan, penambahan kegiatan baru/kegiatan alternatif, penambahan atau pengurangan target kinerja, pagu indikatif, lokasi, kelompok sasaran yang mengalami perubahan dan yang tidak mengalami perubahan.

Sesuai dengan Peraturan Daerah No 22 tahun 2011 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menegakkan peraturan daerah dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat.

Untuk merespon hal tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja harus membuat Rencana Kerja Perubahan yang merupakan penjabaran bagian yang tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN), Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta Rencana Strategis (RENSTRA) SKPD. Perubahan Renja SKPD tersebut adalah dokumen perencanaan SKPD untuk periode 1 (satu) tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Selanjutnya, Perubahan Renja yang tersusun tersebut dijabarkan lebih lanjut dalam RKA (Rencana Kerja dan Anggaran) SKPD, dalam tingkat yang lebih luas (Pemerintah Daerah) dijabarkan dalam RAPBD (Rencana Anggaran dan Belanja Daerah). Berikut digambarkan alur tersebut (menurut UU 25/2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional).

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan provinsi merupakan penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi SKPD, dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja dalam tugas pokok dan

fungsi yang didanai oleh APBD adalah merealisasikan kegiatan sesuai dengan kewenangan tugas pokok dan fungsi yang diberi oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi, sehingga secara tidak langsung Satuan Polisi Pamong Praja mendukung seluruh arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan provinsi.

Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor mempunyai tujuan dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016 yaitu :

5. Terwujudnya Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat.
6. Tegaknya Supremasi Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
7. Terbentuknya Personil Pamong Praja yang Profesional.

3.2 Program dan Kegiatan dalam Perubahan Rencana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016

Dalam Perubahan Rencana Kerja Tahun 2016, Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bogor akan melaksanakan program/kegiatan sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.
Kegiatan ini mengalami perubahan karena pembayaran iuran wajib air naik sehingga memerlukan tambahan anggaran dengan kenaikan anggaran dari Rp 169.200.000,- bertambah Rp 15.600.000,- menjadi Rp 184.800.000,-.
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :
 - a. Pengadaan Mebeleur.
Kegiatan ini mengalami perubahan karena kebutuhan akan mebeleur yang saat ini dirasa kurang layak dengan kenaikan anggaran dari Rp 29.274.000,- bertambah Rp. 71.235.000,- menjadi Rp 100.509.000,- yaitu untuk menambah beberapa unit mebeleur.

b. Pengadaan Peralatan Kantor.

Kegiatan ini mengalami perubahan karena kebutuhan beberapa peralatan kantor yang mendesak dengan kenaikan anggaran dari Rp 118.513.000,- bertambah Rp. 65.432.000,- menjadi Rp 183.945.000,-.

c. Pengadaan Perlengkapan Kantor.

Kegiatan ini mengalami perubahan karena kebutuhan beberapa perlengkapan kantor yang mendesak dengan kenaikan anggaran dari Rp 22.000.000,- bertambah Rp. 63.030.000,- menjadi Rp 85.030.000,-.

d. Pemeliharaan Rutin/Berkala Taman Halaman Kantor.

Kegiatan ini mengalami perubahan karena kebutuhan taman halaman kantor yang perlu diperbaiki dengan kenaikan anggaran dari Rp 38.450.000,- bertambah Rp. 306.522.750,- menjadi Rp 344.972.750,-.

3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :

a. Pengadaan Pakaian Kerja Lapangan

Kegiatan ini mengalami perubahan dalam rangka pengadaan pakaian kerja lapangan dengan kenaikan anggaran dari Rp 155.600.000- bertambah Rp. 202.725.000,- menjadi Rp 358.325.000,-.

b. Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Perlengkapannya

Kegiatan ini adalah kegiatan baru dalam perubahan untuk pengadaan pakaian hitam putih bagi PNS dengan anggaran dari Rp 80.613.200,-.

4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :

a. Pembinaan Mental dan Rohani bagi Aparatur

Kegiatan ini mengalami perubahan karena penambahan hari kerja pelatihan dan peserta dengan kenaikan anggaran dari Rp

156.472.000,- bertambah Rp. 91.775.000,- menjadi Rp 248.227.000,-.

5. Program Peningkatan Pembembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :

b. Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan

Kegiatan ini mengalami perubahan karena ada penambahan kegiatan pengelolaan situs web dan pemeliharaan jaringan LAN dengan kenaikan anggaran dari Rp 199.686.000,- bertambah Rp. 98.686.000,- menjadi Rp 298.372.000,-.

6. Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan yang meliputi beberapa kegiatan yaitu :

a. Operasi Penertiban Pedagang Kaki Lima.

Kegiatan ini mengalami perubahan karena akan dilaksanakan penertiban rutin setiap hari di kawasan jalan Tegar Beriman Kecamatan Cibinong dengan kenaikan anggaran dari Rp 1.017.320.000,- bertambah Rp. 91.500.000,- menjadi Rp 1.108.820.000,-.

b. Patroli Ketertiban Umum.

Kegiatan ini mengalami perubahan karena penambahan hari kerja patroli dengan kenaikan anggaran anggaran dari Rp. 598.600.000,- bertambah Rp. 199.200.000,-menjadi Rp. 797.800.000,-.

c. Penyusunan Rancangan Peraturan dan Keputusan di Bidang Kepamongprajaan.

Kegiatan ini merupakan kegiatan dengan anggaran sebesar Rp. 148.277.000,-.

7. Program Pemberdayaan Masyarakat dalam Menjaga Keamanan dan Ketertiban Lingkungan.

a. Bintek Pelatihan Manajemen dan Juknis Poskamdes.

Kegiatan ini mengalami perubahan penambahan hari kerja pelatihan dan peserta dengan kenaikan anggaran dari Rp

107.856.000,- bertambah Rp. 139.894.000,- menjadi Rp
247.750.000,-.

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 merupakan dokumen perencanaan yang penting dipedomani guna memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pasca sampai dengan akhir tahun 2016.

Dalam upaya menyelesaikan target tahun 2016, seluruh perubahan yang terjadi dalam program dan kegiatan tahun 2016 telah mempertimbangkan kemampuan realisasi pelaksanaan hingga akhir tahun 2016. Dengan demikian diharapkan seluruh unsur di lingkup Satuan Polisi Pamong Praja dapat mempedomani isi dokumen Perubahan Renja Satuan Kera Perangkat Daerah tahun 2016 ini dengan sebaik-baiknya.

Semoga Perubahan Renana Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2016 ini dapat dijadikan acuan bagi seluruh pemangku kepentingan terkait, sehingga diharapkan dapat tercapai tujuan pembangunan daerah Kabupaten Bogor tahun 2016. Akhirnya, ucapan terimakasih disampaikan kepada seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan dokumen ini.

Ditetapkan di : Cibinong
Tanggal : 2016

**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
KABUPATEN BOGOR**

Drs. H. HERDI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 1962.1004.19608.1001